

# PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM MENGATASI TANTANGAN DI BIDANG PERTAHANAN

## THE ROLE OF DEFENCE DIPLOMACY IN COPING WITH CHALLENGES IN THE FIELD OF DEFENCE

Syaiful Anwar<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan Indonesia  
(morolawe7760@yahoo.com.au)

**Abstrak** – Terdapat berbagai tantangan yang masih muncul dalam bidang pertahanan Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah-masalah perbatasan dengan beberapa negara tetangga, permasalahan-permasalahan regional, khususnya tumpang tindih pengakuan terhadap wilayah-wilayah maritim, masalah-masalah global khususnya ancaman pembajakan di laut dan rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya diplomasi pertahanan secara layak. Indonesia telah menerapkan diplomasi pertahanan sebagai alat penyeimbang dari *hard power*. Namun, diplomasi pertahanan yang sesuai memerlukan kompetensi yang memadai dari orang-orang yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI perlu memperhatikan hal ini dalam mengembangkan personelnnya agar memiliki kompetensi yang baik dalam menangani diplomasi pertahanan.

**Kata Kunci** : diplomasi pertahanan, kompetensi, pertahanan, TNI, kerja sama internasional

**Abstract** – There are several challenges that still exist in the field of Indonesian defence. The challenges include border problems with neighbouring countries, regional problems especially with overclaim in certain maritime areas, global problems especially with piracy threats and rivalries among major powers. In order to cope with those challenges, it is necessary to conduct defence diplomacy appropriately. In this paper, defence diplomacy refers to the pursuit of foreign policy objectives through the peaceful employment of defence resources and capabilities. Indonesia has applied defence diplomacy as a ballast hard power. However, proper defence diplomacy requires perfect competencies of human resources who involve in that diplomacy. The institutions of the Indonesian Defence Ministry and the Indonesian Defence Forces need to consider the issue in developing their personnel in order to have adequate competencies in dealing with defence diplomacy.

**Keywords**: defence diplomacy, competency, defence, TNI, international cooperation

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Mayor Jenderal TNI (Marinir), Doktor di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, email: morolawe7760@yahoo.com.au.

## Pendahuluan

Istilah “pertahanan” atau dalam bahasa Inggrisnya “*defence*”, berasal dari bahasa latin “*dēfensum*”, yang artinya “sesuatu aksi untuk menahan suatu serangan”.<sup>2</sup> Istilah tersebut berlaku secara universal, namun untuk Indonesia, penyelenggaraan pertahanan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dinyatakan dalam Undang-undang ini bahwa pertahanan negara Indonesia bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dokumen tersebut lebih lanjut dinyatakan bahwa pertahanan negara adalah:

“Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas terlihat bahwa yang menjadi objek yang akan dipertahankan dalam hal ini adalah tiga kelompok besar, yakni: kedaulatan negara, wilayah negara, dan segenap bangsa. Dalam hal kedaulatan negara, Indonesia akan mempertahankan statusnya sebagai negara berdaulat, serta merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan negara-negara lainnya di dunia ini. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah negara adalah kesatuan geografis yang terdiri dari darat, perairan, dan udara dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan sejarah, perjanjian, dan/atau konvensi internasional. Yang dimaksud dengan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia adalah dengan menjaga agar bangsa terhindar dari ancaman baik yang datang dari manusia maupun dari alam terhadap segenap bangsa Indonesia dimanapun mereka berada, baik berada di wilayah negara Indonesia maupun di luar wilayah negara Indonesia.

Penyelenggaraan pertahanan seperti dimaksud di atas tidaklah ringan, diperlukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh agar hal-hal yang diamanatkan tersebut dapat

---

<sup>2</sup>Collins English Dictionary—Complete & Unabridged 10<sup>th</sup> Edition, (London: William Collins Sons & Co. Ltd. 2009).

<sup>3</sup> Biro Hukum Departemen Pertahanan, *Buku Himpunan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan*, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2007), hlm. 35.

tercapai. Pemerintah dengan dibantu oleh segenap komponen bangsa telah berupaya secara terus menerus untuk melaksanakan tugas tersebut, namun seperti kita ketahui masih banyak tantangan yang menghadang. Hal tersebut dikarenakan karena secara eksternal memang masih terdapat dinamika yang sangat tinggi yang terkait dengan gangguan keamanan, sedangkan secara internal masih terdapat keterbatasan dalam penyelenggaraan pertahanan tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tantangan-tantangan yang muncul dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Tantangan-tantangan tersebut, sesuai dengan Doktrin Pertahanan Negara, dihadapi dengan cara penangkalan dengan menggunakan perangkat *hard power*, dan juga dengan cara diplomasi dengan menggunakan perangkat *soft power*. Dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan bagaimana peran diplomasi pertahanan sebagai perangkat *soft power* dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

### **Tantangan-Tantangan di Bidang Pertahanan**

Dalam bagian ini akan diberikan gambaran tantangan-tantangan yang pernah dan masih dihadapi oleh Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Tantangan-tantangan yang ada sebenarnya cukup banyak dan kompleks, namun akan disampaikan beberapa saja, yang dibagi dalam tantangan yang terkait dengan perbatasan negara RI, tantangan regional, dan tantangan global.

Dalam hal tantangan yang terkait dengan perbatasan negara, ada beberapa hal serius yang akan disampaikan di sini, yakni FIR Singapura, pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara tertentu dengan sengaja, klaim Cina terhadap wilayah Indonesia, dan tumpang tindih klaim Indonesia dan Malaysia di Ambalat.

Permasalahan FIR Singapura sudah sejak lama terjadi, dan hingga kini masih berlangsung. Dalam pengaturan kolom udara, referensi yang biasanya menjadi acuan adalah “*Convention on International Civil Aviation, Chicago 7 December 1944*”. Di dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif (*complete and exclusive*) terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Hingga sekarang pengaturan lalu lintas udara di atas Pulau Batam, Tanjung Pinang dan

Natuna berada di bawah kendali *Air Traffic Control* (ATC) Singapura berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah RI dan Singapura sejak tahun 1995. Namun dalam pelaksanaannya, sering menimbulkan permasalahan, seperti penerbangan dari Tanjung Pinang ke Ranai (Natuna) tidak boleh terbang dengan lurus langsung ke tujuan. Akibatnya adalah terjadi inefisiensi bahan bakar, dikarenakan bertambahnya *air time* atau waktu tempuh. Begitu juga patroli udara yang dilakukan TNI AU dan TNI AL di sekitar perairan Batam, Tanjung Pinang, dan Natuna, sering terkendala karena ATC Singapura lebih mengutamakan penerbangan sipil di Bandara Changi daripada kepentingan pesawat militer Indonesia yang sebenarnya terbang di kawasan udara di wilayah kedaulatan NKRI. Singapura juga menetapkan status “*Danger Two*”, “*Danger Three*”, dan “*Danger Four*” di wilayah udara tersebut, yang merupakan tempat-tempat latihan militer Singapura. Sering terjadi ketika penerbangan di Batam hendak memakai jalur itu, pihak Singapura tidak mengizinkan dengan alasan sedang ada latihan.<sup>4</sup>

Pelanggaran kedaulatan dilakukan oleh beberapa negara antara lain oleh unsur angkatan bersenjata AS, yang terkenal dengan sebutan “Peristiwa Bawean”. Pada tanggal 3 Juli 2003, armada *US Navy* yang terdiri dari kapal induk, *Destroyer* dan *Frigate* berlayar dari Singapura, melalui Selat Karimata, Laut Jawa, menuju Australia. Pada saat melewati perairan Bawean, pesawat tempur F-18 (merupakan kelengkapan armada tersebut) yang terbang dan bermanuver di udara, terdeteksi oleh radar sipil dan militer Indonesia. Identifikasi visual dilakukan oleh dua pesawat F-16 TNI AU, dan selanjutnya diingatkan bahwa mereka melakukan penerbangan gelap di wilayah udara Indonesia. Namun mereka tidak menganggap peringatan ini, bahkan akan menembak jatuh pesawat kita kalau memasuki zona keamanan dari armada AS tersebut. Karena kalah dalam persenjataan dan jumlah, pesawat terbang kita kembali ke pangkalan. Indonesia melayangkan protes kepada pihak AS tentang pelanggaran kedaulatan tersebut dengan alasan membahayakan penerbangan sipil di wilayah udara Indonesia.<sup>5</sup>

Pemerintah Cina secara sepihak telah menarik garis klaim yang masuk dalam wilayahnya, dengan apa yang disebut “*nine dotted line*”, yaitu garis batas berbentuk “U”,

---

<sup>4</sup>Chappy Hakim, *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*, 2011, (Jakarta: Red& White Publishing), hlm. 111-3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 175-6.

termasuk Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Spratly, yang dipublikasikan oleh Pemerintah Cina secara diam-diam sejak Februari 1948. Akhirnya pada 7 Mei 2009, pemerintah Cina mendaftarkan klaimnya secara resmi kepada PBB. Setelah itu, beberapa negara, yaitu Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Taiwan yang juga mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly, melancarkan protes terhadap klaim tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengadakan Pertemuan Kelompok Ahli (PKA) bertemakan “Perkembangan di Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Stabilitas Politik dan Keamanan di Kawasan Asia Pasifik”, di Bandung, pada tanggal 30 November 2010. Para ahli tersebut sepakat bahwa dilihat dari segi hukum internasional, peta Laut Cina Selatan yang dibuat oleh Cina tersebut, dikenal sebagai “*nine dotted line*”, adalah bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982.<sup>6</sup> Pemerintah Indonesia, meskipun tidak mengklaim wilayah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, juga melancarkan protes, karena garis tersebut juga masuk dalam wilayah ZEE dan Landas Kontinen RI di wilayah Kepulauan Natuna.

Pada tahun 1979, pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4°10' arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada *Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia* tahun 1969 dan *Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia* tahun 1970. Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.<sup>7</sup>

Upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia juga masih menghadapi tantangan. Pada tahun 2001, sekelompok nelayan dari Sumatera Utara mencari ikan di perairan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Karena dianggap

---

<sup>6</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pertemuan Kelompok AM (PKA), “Perkembangan di Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Stabilitas Politik dan Keamanan di Kawasan Asia Pasifik: Penguatan Posisi dan Strategi RI*, 2010, dalam [http://www.kemlu.go.id/\\_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseL](http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseL), diunduh pada 7 Juli 2011.

<sup>7</sup> Rosmi Hasibuan, “Tinjauan Yuridis Konflik Indonesia Malaysia Tentang Kepemilikan Hak Berdaulat Atas Blok Ambalat dan Ambalat Timur”, *Jurnal Equality*, Vol. 10, 2 Agustus 2005.

melanggar wilayah ZEE Malaysia, mereka ditembaki secara membabi buta oleh aparat keamanan laut Malaysia, yang mengakibatkan seorang dari mereka tewas, dan lainnya sejumlah 39 orang ditahan pihak Malaysia.<sup>8</sup> Nelayan-nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sering mencari ikan di wilayah tumpang tindih antara Landas Kontinen Australia, tetapi masuk dalam ZEE Indonesia, sering ditangkap aparat keamanan laut Australia, dan kapal-kapal mereka, yang menjadi alat utama mereka mencari nafkah langsung ditembaki dan dibakar di tengah laut. Namun banyak nelayan kita yang melaporkan bahwa posisi kapal mereka sebetulnya masih di perairan Indonesia, tetapi GPS mereka tidak diakui oleh aparat Australia dan kemudian menggiring nelayan kita masuk ke wilayah Australia, kemudian baru ditangkap. Sudah tercatat puluhan kapal nelayan kita dibakar, dan ratusan yang dipenjara di Australia.<sup>9</sup>

Pembajakan kapal-kapal Indonesia sering terjadi. Kapal barang milik Indonesia yaitu MV Sinar Kudus yang mengangkut nikel seharga triliunan rupiah, dengan awak kapal sejumlah 20 orang, dibajak di laut Somalia pada tanggal 16 Maret 2011. Akhirnya dengan tebusan sejumlah uang dan juga dibarengi dengan operasi militer, yang terdiri dari tiga kapal perang, pesawat terbang, dan sejumlah pasukan khusus serta marinir, kapal tersebut dapat dibebaskan.<sup>10</sup> Namun, karena tempatnya yang sangat jauh, penggelaran operasi pengamanan tidak dapat diteruskan, semua kekuatan militer harus ditarik pulang. Dengan demikian tidak ada jaminan bahwa kapal-kapal kita atau orang-orang kita akan terlindungi ketika melalui wilayah tersebut.

Dalam konteks regional, kawasan Asia Tenggara adalah wilayah negara-negara yang hampir semuanya memiliki permasalahan batas wilayah yang masih belum dapat diselesaikan, serta berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik, serta secara internal, sebagian besar masih memfokuskan perhatiannya pada masalah dalam negeri untuk menghadapi ancaman terorisme, separatisme, penyelundupan dan konflik komunal. Merembaknya isu perbatasan di kawasan Laut Cina Selatan atas kepulauan Spratly dan

---

<sup>8</sup> Liputan 6 SCTV.com, “Nelayan Indonesia Tewas Ditembak Polisi Malaysia”, 8 Maret 2001, dalam [http://berita.liputan6.com/read/9187/nelayan\\_Indoneesia\\_tewas\\_dite](http://berita.liputan6.com/read/9187/nelayan_Indoneesia_tewas_dite), diunduh pada 7 Juli 2011.

<sup>9</sup> Antara News Kupang, “Perahu Dibakar Patroli AL Australia, Nelayan Kupang Kesulitan”, dalam <http://taziex.nice-forum.net/t146-perahu-dibakar-patroli-al-australia->, 12 Juni 2008, diunduh pada 7 Juli 2011.

<sup>10</sup> Kompas.com, “Kronologi Satgas TNI di Perairan Somalia”, 2 Mei 2011, dalam <http://internasional.kompas.com/read/2011/05/02/0839123/Kronolog>, diunduh pada 7 Juli 2011.

Paracel yang diklaim oleh Cina, Taiwan, dan empat negara ASEAN, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, serta Brunei masih belum dapat dituntaskan. Selain itu, karena merupakan jalur laut yang sangat vital, keamanan Selat Malaka menjadi sangat penting dan tidak pernah surut dari perhatian negara-negara besar terutama AS, Jepang, Cina, dan Korea Selatan, untuk ikut campur tangan dan ingin melibatkan kekuatannya dengan dalih pengamanan jalur navigasi internasional. Namun Indonesia dan Malaysia tetap menolak kehadiran militer asing di Selat Malaka dan berusaha menjamin keamanan jalur pelayaran tersebut dengan meningkatkan kerjasama dalam bentuk patroli laut terkordinasi yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kedua faktor tersebut, yaitu belum selesainya klaim perbatasan dan keberadaan jalur internasional di kawasan yang sangat strategis serta lemahnya sistem pengawasan menyebabkan timbulnya kerawanan terhadap kejahatan lintas negara.<sup>11</sup>

Sementara itu, perkembangan kekuatan ekonomi yang semakin pesat dan kemajuan teknologi militer Cina yang sangat spektakuler, telah menarik perhatian AS dan negara-negara di kawasan Asia Timur terutama Jepang dan Korea Selatan. Dalam “Buku Putih” nya yang dirilis 2 Agustus 2011, Jepang menyebutkan bahwa Cina terlalu “asertif” dalam menyikapi setiap masalah dengan negara tetangganya. Kemampuan Cina dalam teknologi militer termasuk diantaranya keberhasilannya menguji coba pesawat tempur berteknologi siluman atau *stealth*, pembangunan kapal induk dan rudal anti kapal perang DRF-21D, yang mampu melumpuhkan kapal induk AS, telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara di kawasan. Masalah keamanan lainnya adalah masih belum tercapainya usaha perdamaian di Semenanjung Korea termasuk isu nuklir Korea Utara yang masih kontroversial. Di kawasan ini juga tidak ketinggalan masalah sengketa kepulauan yang melibatkan Jepang dengan Cina atas pulau Senkaku dan antara Jepang dengan Korea Selatan atas pulau Dokdo/Takeshima, yang keduanya berpotensi sebagai sumber ketegangan.<sup>12</sup>

Di kawasan Australia dan Oseania, Australia sebagai kekuatan utama dan sekaligus merupakan sekutu dekat AS di kawasan, tetap memainkan peran yang sangat penting

---

<sup>11</sup>Direktorat Analisa Strategis Kemhan (Ditanstra), *Updating Analisa Strategis: Potensi Kerja sama dan Kemungkinan Ancaman Tahun 2011*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2011), hlm. 5.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

dalam menjaga stabilitas regional. Australia terus melakukan pembangunan kekuatan militer melalui pembelian senjata canggih, baik kapal perang, pesawat pembom strategis, terus meningkatkan kerja sama sistem pertahanan rudal dengan AS dan Jepang. Namun karena posisinya yang cenderung dikatakan sebagai “*deputy sheriff*” AS di kawasan Asia Pasifik, menyebabkan Australia tidak memiliki sikap yang jelas. Australia selalu menempatkan kepentingan AS di atas kepentingan lain di kawasan. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa dalam rangka perang melawan terorisme dan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, Australia tetap menerapkan doktrin *pre-emptive strike*, atau serangan untuk mengantisipasi, yang tentunya sangat mengancam kedaulatan negara lain di kawasan. Keberadaan kelompok pelarian separatis Papua di Australia yang memperoleh simpati dari sebagian rakyatnya serta adanya sekelompok negara di kawasan Pasifik Selatan yang masih memberikan dukungan terhadap gerakan separatis di Papua melalui Ikatan *Melanesian Brotherhood*, yang tentunya berpengaruh terhadap situasi politik dan keamanan dalam negeri Indonesia.<sup>13</sup>

Dalam konteks global, kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, disamping memudahkan interaksi antar negara, menghadirkan tantangan multidimensional yaitu munculnya ancaman baru melalui dunia maya (*cyber space*) yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Ancaman dunia maya (*cyber threat*) dapat bermotif kepentingan individu, kelompok maupun negara, yang sulit diantisipasi karena sifatnya yang *unconventional*, tidak mengenal front dan sasarannya sangat luas.<sup>14</sup>

Amerika Serikat (AS) menyadari bahwa hegemoninya mendapat tantangan serius dari perkembangan Cina, yang memiliki potensi perkembangan ekonomi yang sangat cepat dan secara konsisten terus meningkatkan kemampuan teknologi serta pembangunan kekuatan militer. AS berusaha mengisolasi Cina melalui hubungan dekat dengan sahabat lamanya, seperti Jepang dan Uni Eropa, kemudian terus berupaya mendekati India, dan meningkatkan kemitraan dengan Rusia. Namun usaha AS tersebut tidak sepenuhnya berhasil dan ternyata Cina berhasil meningkatkan pengaruhnya di kawasan Afrika dan Amerika Latin. Dinamika persaingan kedua negara tersebut

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik (*key driver*) yang sangat berpengaruh terhadap keamanan internasional.<sup>15</sup>

Ancaman keamanan non-tradisional akan tetap menjadi ancaman nyata, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki sistem pengamanan dan pengawasan yang cenderung masih lemah akibat rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Ancaman dalam bentuk terorisme, penyelundupan senjata dan obat-obatan, penyelundupan manusia, dan pembajakan bersenjata tetap menjadi sumber gangguan keamanan internasional. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memungkinkan pelaku kejahatan internasional memperlengkapi dirinya dengan sarana dan alat berteknologi tinggi, serta memanfaatkan dunia maya sebagai medan operasinya sehingga sulit dihadapi. Isu keamanan non-tradisional lainnya yang menonjol adalah upaya non-proliferasi senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) yang ditempatkan sebagai salah satu isu krusial dalam permasalahan keamanan global. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga agar senjata tersebut tidak jatuh ketangan pihak yang tidak dikehendaki, terutama kelompok teroris internasional.<sup>16</sup>

### **Peran Diplomasi Pertahanan**

Terminologi “Diplomasi Pertahanan” terdiri dari dua kata, yaitu diplomasi dan pertahanan. Untuk itu, sebelum membahas definisi dan hal-ihwal yang menyangkut diplomasi pertahanan, perlu dibahas terlebih dahulu tentang pengertian diplomasi serta hal-hal yang menyangkut diplomasi tersebut. Secara etimologis, kata diplomasi berasal dari bahasa Yunani “*diploun*”, yang mempunyai arti duplikasi atau menggandakan. Sedangkan kata “diploma” juga erat kaitannya dengan kata dari bahasa Inggris *duplicity* atau duplikasi, yang berarti menipu atau bermuka dua, seperti budaya orang Bulgaria yang bila berkata “ya”, mereka menggelengkan kepala.<sup>17</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kata “diplomasi” diartikan sebagai “urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Muhammad Shoelhi, *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 74.

di negeri lain; pengetahuan dan kecakapan menggunakan pilihan kata yang tepat bagi keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya”).<sup>18</sup> Sementara itu menurut Collins Dictionary, “*diplomacy is the activity or profession of managing relations between the governments of different countries*”, atau dalam bahasa Indonesia adalah aktivitas atau profesi dalam mengatur hubungan antara pemerintah dari negara-negara yang berbeda.<sup>19</sup>

Beberapa pakar mendefinisikan “diplomasi” secara berbeda. Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 telah mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya.<sup>20</sup> Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.<sup>21</sup>

Dari beberapa definisi atau pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa diplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah suatu negara dalam memperjuangkan kepentingan negaranya dalam hubungan internasionalnya dengan menggunakan berbagai macam atau cara berkomunikasi. Dari pengertian ini, maka terlihat bahwa diplomasi dapat mempunyai berbagai bentuk, tergantung dengan pejabat pemerintah yang melaksanakannya, kepentingan atau sektor pemerintahan yang menjadi forum diplomasinya serta cara atau macam komunikasi yang digunakan. Namun secara umum, diplomasi menggunakan tata cara khusus serta memerlukan kompetensi yang khusus pula dari para pelakunya.

Istilah “diplomasi pertahanan” belum banyak disinggung oleh literatur tentang hubungan internasional atau politik antar bangsa. Beberapa pihak mempunyai pendapat

---

<sup>18</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 331.

<sup>19</sup> *Collins English Dictionary*, *op. cit*, hlm. 427.

<sup>20</sup>Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 3-4.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

yang berbeda tentang jenis diplomasi ini, namun pengertian umum dari “diplomasi pertahanan” atau *defence diplomacy* adalah “*the pursuit of foreign policy objectives through the peaceful employment of defence resources and capabilities*”.<sup>22</sup> Disini terlihat bahwa diplomasi pertahanan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diplomasi keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal yang menjadi pembeda dari jenis diplomasi yang lain adalah alat yang digunakan untuk berdiplomasi, yaitu sumber daya dan kemampuan pertahanan suatu negara.

Diplomasi pertahanan adalah suatu konsep yang mengatur tentang kegiatan internasional yang berhubungan dengan pertahanan yang bermula dari pertimbangan kembali peran dari sektor pertahanan setelah usainya perang dingin, yang dimulai oleh Kementerian Pertahanan Inggris, dan adalah suatu prinsip “digunakan untuk membantu dunia Barat dalam menyesuaikan dengan lingkungan keamanan internasional yang baru”.<sup>23</sup> Meskipun cakupan kegiatan diplomasi pertahanan sangat beragam, pada umumnya diplomasi pertahanan tidak mencakup operasi militer, tetapi mencakup kegiatan pertahanan dalam lingkup internasional yang lain seperti pertukaran personel, kunjungan kapal perang dan pesawat militer, pertemuan tingkat tinggi (dalam hal ini menteri pertahanan dan pejabat senior kementerian pertahanan), pertemuan bilateral dan pembicaraan antar staf (*staff talks*), pendidikan dan latihan (*training and exercises*), forum pertahanan regional, program bantuan (*outreach*), tindakan untuk membangun kepercayaan dan keamanan (*confidence and security building measures*), dan kegiatan-kegiatan tentang pembatasan pengembangan senjata (*non-proliferation*).<sup>24</sup>

Banyak negara di dunia sudah secara konsisten menerapkan diplomasi pertahanan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diplomasi total yang dilakukan oleh pemerintah mereka, bahkan ada beberapa negara yang menempatkan diplomasi pertahanan ini menjadi alat utama dalam struktur diplomasi internasional mereka. Pemerintah Inggris menetapkan diplomasi pertahanan sebagai satu dari delapan misi pertahanan mereka, dimana diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan tujuan untuk “menghilangkan permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan dan membantu

---

<sup>22</sup>Wikipedia Encyclopedia, *Defence Diplomacy*, dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Defence\\_diplomacy](http://en.wikipedia.org/wiki/Defence_diplomacy) , diunduh pada 28 Agustus 2011.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

pembangunan angkatan bersenjata negara-negara lain dengan prinsip demokrasi dan penuh tanggung jawab” sehingga tercipta suatu “kontribusi yang signifikan pada pencegahan dan resolusi konflik”.<sup>25</sup>

Singapura sejak tahun 1960 telah menetapkan diplomasi pertahanan sebagai salah satu kegiatan penting dalam sistem pertahanan negara mereka. Menurut pandangan mereka, diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan beberapa alasan tertentu, antara lain: (i) untuk mendorong kekuatan-kekuatan besar dunia yang bersahabat untuk memelihara kepentingan mereka dalam keamanan di Asia Tenggara, khususnya Singapura; (ii) untuk menyediakan kerja sama pertahanan dengan konteks yang luas yang dapat memberikan akses bagi Singapura ke fasilitas-fasilitas negara lain, sekaligus untuk memperbaiki doktrin militer teknologi, sementara pada kesempatan yang ada juga dimanfaatkan untuk menjual peralatan pertahanan produk Singapura; (iii) untuk mengembangkan interoperabilitas (*interoperability*) dengan angkatan bersenjata yang bersahabat dari negara-negara lain; (iv) untuk memfasilitasi kerja sama keamanan fungsional (sebagai contoh, patroli laut gabungan dengan Indonesia dalam memerangi pembajakan di perairan regional); (v) untuk membantu peningkatan hubungan di sektor-sektor politik dan ekonomi; dan (vi) untuk meredakan ketegangan dengan musuh potensial di kawasan melalui latihan bersama dan pertukaran militer lainnya yang ditujukan untuk membangun kepercayaan.<sup>26</sup>

Cina sebagai negara komunis terbesar di dunia, secara tradisional tidak mempunyai keinginan untuk terlibat dalam persekutuan (*alliance*) dengan negara manapun, termasuk juga kegiatan-kegiatan kerja sama pertahanan yang banyak dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, seperti latihan militer bersama, membangun interoperabilitas peralatan militer, pendidikan dan tukar-menukar pengetahuan doktrin militer. Cina juga melarang unit-unit militernya untuk ditempatkan di luar negeri. Namun, dimulai sekitar awal tahun 2000, kebijakan pemerintah Cina dalam hal diplomasi pertahanan mulai berubah. Di tahun 2000, merespon aksi militer NATO di Kosovo, Cina mengambil bagian, bersama-sama dengan Rusia, dalam latihan angkatan laut gabungan

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>T. Huxley, *Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore*, (New South Wales: Allen & Unwin, 2000), hlm. 196, dalam <http://www.questia.com/reader/printPaginator/34>, diunduh pada 28 Agustus 2011.

di Pasifik Barat (*Western Pacific*). Aksi ini tentu saja secara meyakinkan merupakan jawaban atas kebijakan dan kekuatan AS dan merupakan era baru dari kebijakan luar negeri Cina. Sejak tahun 2001, Cina juga meningkatkan peran serta dan pengaruhnya dalam organisasi keamanan regional yang mereka sebut *the Shanghai Cooperative Organization* (SCO), yang beranggotakan negara-negara Cina, Rusia, Kazakstan, Kyrgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Cina juga merupakan bagian politik luar negeri Cina dalam meningkatkan pengaruh di kawasan. Cina juga meningkatkan kerja sama militer dengan angkatan bersenjata negara-negara ASEAN melalui saling kunjung antar pejabat pertahanan, pertukaran personel militer dalam pendidikan dan pelatihan, latihan militer bersama, serta bantuan peralatan militer.<sup>27</sup>

Diplomasi pertahanan yang dilakukan Cina kepada negara-negara Amerika Latin merupakan instrumen penting dari kebijakan pertahanan negara tersebut. Diplomasi tersebut antara lain berupa pemberian kesempatan yang lebih besar kepada para perwira militer negara-negara Amerika Latin untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan di Sekolah Staf dan Komando dari Angkatan Bersenjata Cina atau *People's Liberation Army* (PLA), dan juga di Universitas Pertahanan Cina atau *National Defence University* (NDU). Undangan untuk mengunjungi Cina juga ditingkatkan, antara lain ke tempat-tempat seperti industri perkapalan Cina, industri peralatan militer, dan juga bangunan-bangunan modern di Cina. Para perwira PLA juga semakin banyak yang berkunjung ke negara-negara seperti Brazil, Chili, Argentina, Venezuela, Kuba, dan Meksiko. Pada tahun 2005, Cina menjual paket radar lengkap ke Chili. Selanjutnya Cina juga menjual 24 pesawat tempur, dan 10 pesawat angkut militer ke Venezuela.<sup>28</sup>

Negara lain di Asia Tenggara yaitu Vietnam juga menempatkan diplomasi pertahanan sebagai bagian dari politik luar negeri mereka. Menteri Pertahanan Vietnam menyatakan bahwa diplomasi pertahanan akan terus diterapkan secara komprehensif di masa-masa mendatang. Untuk itu perlu dilakukan secara terus-menerus koordinasi antara angkatan bersenjata dengan kementerian-kementerian lain di pemerintahan Vietnam. Diplomasi pertahanan diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata terhadap upaya-

---

<sup>27</sup>S. Blank, "China: Defense Diplomacy, Chinese Style", *Asia Times On-line*, dalam <http://www.atimes.com/atimes/China/EK11Ad02.html>, diunduh pada 28 Agustus 2011.

<sup>28</sup>Horta, L., "In Uncle Sam's Backyard: China's Military Influence in Latin Amerika", *Jurnal Military Review*, September-Oktober 2008.

upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan regional yang damai dan stabil yang diperlukan dalam pembangunan dan perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan nasional dan keutuhan teritorial, serta meningkatkan posisi negara dan angkatan bersenjata di kawasan. Diplomasi pertahanan dilakukan melalui kegiatan diplomatik dengan negara-negara tetangga dan negara-negara di kawasan, dan ikut membantu hubungan dan menciptakan perbatasan negara yang damai, bersahabat, stabil dan berkembang. Kementerian Pertahanan Vietnam juga secara serius ikut menyelenggarakan konferensi-konferensi keamanan dan pertahanan berskala regional dan internasional.<sup>29</sup>

Sementara itu, India sebagai kekuatan baru yang sedang berkembang di Asia, menempatkan diplomasi pertahanan sebagai alat untuk menyangga keamanan nasional dan juga meningkatkan kerja sama strategis. Di tahun 2011, Kementerian Pertahanan India telah merencanakan 14 hingga 18 latihan militer bersama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Bangladesh, Mongolia, Seychelles, Singapura, Prancis, Thailand, Tajikistan, yang diselenggarakan baik di dalam negeri India maupun di luar negeri. Latihan bersama tersebut melibatkan unit-unit dari angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut.<sup>30</sup> India juga meningkatkan diplomasi pertahanannya dan kontribusinya dalam kerja sama dengan negara-negara ASEAN. Hubungan ini diselenggarakan melalui latihan militer gabungan, patroli angkatan laut dan udara gabungan, produksi bersama dari peralatan militer tertentu, penelitian dan pengembangan bersama dalam teknologi militer dan sipil. India juga meningkatkan peran sertanya dalam kerja sama mengatasi gangguan keamanan non-tradisional, khususnya dalam mengamankan jalur laut internasional (*Sealanes of Communication/SLOCs*) dan mengatasi terorisme dan pembajakan di laut.<sup>31</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pengertian diplomasi pertahanan cukup beragam dari suatu negara dengan negara lainnya. Dari perspektif Indonesia,

---

<sup>29</sup>Viet Nam Today, "Defence Diplomacy, Vital for Nation's Future", 9 Agustus 2011, dalam <http://www.dztimes.net/post/politics/defence-diplomacy-vital-for-nat>, diunduh pada 28 Agustus 2011.

<sup>30</sup>The Times of India, "Flurry of War Games to Boost Defence Diplomacy", 22 Oktober 2010, dalam <http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-10-22/india/282509>, diunduh pada 28 Agustus 2011.

<sup>31</sup>Saw Swee-Hock, 2005, *ASEAN-China Relations*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies), hlm. 130, dalam <http://www.questia.com/reader/printPaginator/36>, diunduh pada 22 Agustus 2011.

dengan politik luar negerinya yang bebas aktif serta selalu berpartisipasi aktif dalam memelihara perdamaian dunia, maka diplomasi pertahanan akan didefinisikan sebagai “segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam berhubungan dengan negara-negara lain di sektor pertahanan dengan menggunakan sumber daya dan kemampuan pertahanan yang ada, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan pertahanan”. Diplomasi pertahanan berbeda dengan jenis diplomasi-diplomasi yang lain, seperti di sektor politik yang dilakukan oleh Kemlu, di sektor ekonomi yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan ekonomi (Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, dan lain-lain), serta di sektor sosial budaya yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang terkait dengan sosial budaya (Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan lain-lain). Adapun sumber daya yang digunakan dalam diplomasi pertahanan yaitu sumber daya yang dimiliki oleh sektor pertahanan, seperti personel, peralatan, dan pengetahuan dan keterampilan di bidang pertahanan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mendukung terealisasinya kebijakan pertahanan, yaitu mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta ikut serta memelihara perdamaian dunia.

Diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan berpegang teguh pada beberapa prinsip yang mendasar. Yang pertama adalah bahwa diplomasi pertahanan harus dijalankan dalam koridor yang berada diantara kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri pemerintah. Hal ini mengandung arti bahwa dalam mencapai misi yang digariskan oleh kebijakan pertahanan, diplomasi pertahanan juga merupakan sub-sistem dari diplomasi yang dimotori oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Aplikasi di lapangannya dapat beragam, sebagai contoh dalam konteks kerja sama bilateral, pembuatan perjanjian di bidang pertahanan (*Defence Cooperation Agreement*) dilakukan atas dasar ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan pembuatan perjanjian internasional dan penandatungannya memerlukan persetujuan (*full power*) yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Luar Negeri. Pengiriman pasukan pemelihara perdamaian dalam misi Perserikatan bangsa-Bangsa, memerlukan pertimbangan politik yang dikeluarkan oleh Kemlu, dan selanjutnya atas keputusan Presiden RI. Dalam konteks

regional, forum-forum pertemuan di bidang pertahanan merupakan bagian dari forum-forum politik luar negeri, seperti ADMM (*ASEAN Defence Ministers' Meeting*) merupakan bagian dari APSC (*ASEAN Political Security Community*). Prinsip yang kedua adalah bahwa penyelenggaraan diplomasi pertahanan perlu menerapkan politik luar negeri yang memang peran hakikinya adalah sebagai alat perdamaian, bukan perlengkapan perang. Tentang tujuan politik luar negeri Morgenthau menegaskan bahwa:

“Tujuan politik luar negeri itu relatif dan bersyarat: untuk membelokkan, tidak untuk mematahkan, keinginan pihak yang lain sejauh diperlukan, agar dapat diselamatkannya kepentingan-kepentingan utamanya sendiri tanpa melukai perasaan pihak-pihak lainnya. Metode-metode politik luar negeri itu relatif dan bersyarat: jangan melangkah maju dengan menghancurkan hambatan-hambatan yang ada di hadapan kita, tetapi mundurlah dari situ, elakkan hambatan-hambatan itu, adakan gerakan-gerakan menghindar di sekitar situ, secara perlahan-lahan perlunak dan cairkan hambatan itu melalui persuasi, negosiasi, dan tekanan”.<sup>32</sup>

Diplomasi pertahanan yang diselenggarakan juga mempunyai maksud dan tujuan yang sejalan dengan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan. Adapun maksud dari diplomasi pertahanan adalah untuk mengajak dan mendorong negara-negara lain baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif untuk dapat bekerjasama dengan Indonesia dalam bidang pertahanan. Adapun tujuannya adalah dapat terwujudnya kepentingan-kepentingan pemerintah di bidang pertahanan, yakni terciptanya situasi lingkungan negara yang bersahabat terhadap Indonesia, baik lingkungan di sekitar perbatasan negara Indonesia, di kawasan Asia Tenggara, di kawasan Asia Pasifik, dan selanjutnya secara global.

Termasuk dalam tujuan ini adalah terwujudnya suatu situasi dimana negara-negara yang bersahabat tersebut mendukung upaya-upaya pemerintah RI dalam membangun kemampuannya di sektor pertahanan. Contoh kongkrit dari pencapaian tujuan ini adalah upaya-upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersahabat dengan jalan menjalin kerjasama pertahanan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia,

---

<sup>32</sup>H.J. Morgenthau dan Kenneth W. Thompson, *Politik Antar Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 649-50.

Singapura, Filipina, Australia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, dan Palau. Dalam rangka menciptakan lingkungan regional Asia Tenggara, Indonesia secara aktif terlibat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di ASEAN. Untuk lingkup yang lebih luas, agar tercipta situasi lingkungan yang kondusif di Asia Pasifik, Indonesia juga aktif dalam forum ADMM Plus dan ARF. Dalam rangka menciptakan kondisi global yang aman dan damai, Indonesia aktif dalam operasi perdamaian PBB. Dalam rangka mencapai tujuan untuk terciptanya kemampuan yang memadai di bidang pertahanan, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, India, Ceko, Jerman, Turki, dan lain-lain.

Diplomasi pertahanan diselenggarakan dengan melakukan pembicaraan resmi (*talks*) yaitu pembicaraan yang dilakukan oleh para pejabat Kemhan dan TNI dalam forum-forum atau pertemuan resmi yang membicarakan agenda pembicaraan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Dari macam forumnya, maka “pembicaraan” dapat digolongkan dalam forum bilateral, yaitu pertemuan yang dilakukan dengan suatu negara sahabat lainnya (contohnya adalah *General Border Committee Malaysia-Indonesia/ GBC Malindo*, *Indonesia-United States Strategic Dialogues/IUSSD*, dan *Indonesia-Australia Defence and Strategic Dialogue/IADSD*); dan forum multilateral, yaitu pertemuan yang dilakukan dengan beberapa negara sahabat lainnya, baik dalam struktur yang sudah baku, seperti ASEAN, ARF, maupun dalam organisasi yang tidak terstruktur secara baku.

Dari segi kedudukan pejabat yang terlibat, maka “pembicaraan” dapat digolongkan dalam tingkat Menteri (*ministers level*), yaitu pertemuan yang dilakukan oleh Menhan RI dengan satu atau beberapa Menhan dari negara lain (contohnya adalah pertemuan Menhan RI dengan Menhan negara lain yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, *ASEAN Defence Ministers’ Meeting/ADMM*); tingkat Panglima Angkatan Bersenjata (*Chiefs of Defence Forces level*), yaitu pertemuan antara Panglima TNI dengan satu atau beberapa pimpinan angkatan bersenjata negara lain (contohnya adalah *Indonesia-Thailand High Level Committee/ITHLC*, *ASEAN Chiefs of Defence Force Informal Meeting/ACDFIM*), tingkat pejabat senior (*senior official level*), yaitu pertemuan para pejabat senior dari Kemhan atau TNI dengan *counterparts* dari negara lain (contohnya adalah *ASEAN Defence Senior Officials Meeting/ADSOM*); dan tingkat pejabat staf (*staff*

level), yaitu pertemuan antara pejabat setingkat staf dari Kemhan atau TNI dengan *counterparts* dari negara lain.

Dipandang dari materi yang terkandung, maka “pembicaraan” dapat berupa tukar pandangan (*exchange views*), yaitu pembicaraan mengenai masalah strategis dan kebijakan keamanan dan pertahanan (contohnya pembicaraan pada kunjungan resmi Menhan ke negara tertentu, *Jakarta International Defence Dialogue/JIDD*, dan *ADMM Retreat*); pembicaraan dokumen perjanjian, yaitu pertemuan pada tingkat pejabat senior maupun tingkat staf untuk membicarakan dan menegosiasikan dokumen resmi (yang pada umumnya mengikat secara hukum atau *legally binding*) dalam hal kerja sama pertahanan dengan negara lain (sebagai contoh adalah Kelompok Kerja/*Working Group* untuk negosiasi *Defence Cooperation Agreement/DCA*), Kelompok Kerja untuk membicarakan kerja sama dalam lingkup ADMM; dan pembicaraan tingkat implementatif, yaitu pembicaraan pada tingkat operasional atau teknis untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai (sebagai contoh adalah Kelompok Kerja perencanaan latihan bersama, Kelompok Kerja para ahli/*Expert Working Group* pada bidang yang disepakati dalam ADMM Plus).

Dalam lingkup praktik di lapangan, diplomasi diaplikasikan dalam bentuk Kegiatan Kerja sama (*cooperative activities*), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh institusi Kemhan dan TNI baik secara individual maupun dalam bentuk unit-unit operasional dengan individual atau unit-unit operasional yang berasal dari negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Dilihat dari forum yang digunakan dalam kegiatan ini, maka Kegiatan Kerja sama dilakukan dalam bentuk kegiatan kerja sama bilateral, yaitu kegiatan yang dilakukan antara Kemhan atau TNI dengan suatu negara sahabat (contoh dalam hal ini adalah *Patkor Malindo/Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia*, *Latma Indosin/Latihan Bersama Indonesia-Singapura*, *Dawn Kookabura*/latihan bersama antara pasukan khusus TNI dan Angkatan Bersenjata Australia, dan *FTX Project/proyek kerja sama pembuatan pesawat tempur antara Indonesia dengan Korea Selatan*); dan kegiatan kerja sama multilateral, yaitu kegiatan yang dilakukan antara Kemhan atau TNI dengan beberapa negara lainnya (sebagai contoh adalah *ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise/ ARF DIREX*, *Malacca Strait Patrol/ MSP*, yakni patroli laut dan udara bersama di Selat Malaka yang melibatkan negara-negara: Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand).

Dilihat dari segi bidang atau materinya, maka Kegiatan Kerja sama dapat dilakukan dalam bidang intelijen, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh staf intelijen Kemhan atau TNI dengan *counterpart*-nya dari negara lain, baik dalam hal pembangunan kemampuan (*capacity building*) maupun pertukaran intelijen (*intelligence exchanges*); bidang pendidikan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan latihan (*education and training*) baik secara individual maupun secara institusi Diklat (sebagai contoh adalah pengiriman perwira TNI dan personel Kemhan untuk mengikuti pendidikan Sesko Angkatan, Sesko TNI, setingkat Lemhanas, pelatihan tingkat taktis dan teknis, serta pendidikan akademik setingkat S1, S2, dan S3 di negara tertentu dan sebaliknya, dan *ASEAN Regional Forum-Heads of Defence University Meeting/ARF-HDUCIM*); bidang operasi militer, yaitu kegiatan yang dilakukan antara unit-unit operasi TNI dengan *counterpart*-nya dari negara lain dalam operasi militer bersama (sebagai contoh adalah *Philippines-Indonesia Coordinated Patrol/Philindo Corpat*, *India-Indonesia Coordinated Patrol/Indindo Corpat*, dan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura/Patkor Indosin); di bidang Latihan Bersama (Latma), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit Kemhan dan TNI dengan *counterpart*-nya dalam melakukan latihan bersama baik dalam latihan militer atau dalam bidang non-militer (sebagai contoh adalah *Latgabma Malindo*/latihan gabungan bersama antara TNI dan Angkatan Tentera Malaysia/ATM, dan *TNI-United States Pacific Command Subject Matter Expert Exchanges/TNI-USPACOM SMEE*, dan *Elang IndoThai*, yakni latihan antara Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Udara Thailand); dan di bidang logistik dan industri pertahanan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh Kemhan atau TNI dengan *counterpart*-nya dari luar negeri di bidang logistik dan industri pertahanan (sebagai contoh dari hal ini adalah dengan adanya *TNI-ADF MLA/Mutual Logistics Assistance*, yaitu kesepakatan untuk saling membantu di bidang logistik militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia; *TNI-US PACOM ACSA/Assistance and Cross Servicing Agreement*, yaitu kesepakatan untuk saling memberikan pelayanan terhadap unit-unit operasi militer antara TNI dan *US Pacific Command*; dan *FTX Project*, yaitu kegiatan kerjasama dalam memproduksi pesawat tempur *FTX/fighters* antara Indonesia dan Korea Selatan).

Diplomasi pertahanan juga diimplementasikan dengan kegiatan misi perdamaian (*peace mission*), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat atau perwira Kemhan atau TNI

baik secara individual maupun dalam kelompok atau kontingen dalam tugas-tugas misi perdamaian dunia maupun mediasi dalam pertikaian. Dari segi tingkatan pejabat atau personel yang ditugaskan, sekaligus fungsi yang dikerjakan, maka mereka dapat bertugas sebagai Staf di *United Nations Department of Peacekeeping Operations* (UNDPKO), yaitu para pejabat atau personel yang melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh organisasi tersebut yang berhubungan dengan manajemen *UN peacekeeping missions* di beberapa wilayah di dunia; komandan atau staf lapangan di Organisasi Gabungan, yang mengisi struktur organisasi gabungan yang sedang ditugaskan di wilayah tertentu (sebagai contoh beberapa perwira TNI yang bertugas di UNIFIL di Libanon); komandan atau staf Kontingen Indonesia, dengan menduduki jabatan sebagai Komandan Kontingen atau Staf di Markas Kontingen Indonesia tersebut (sebagai contoh Komandan Kontingen Garuda dan Staf Kontingen di UNIFIL dan sebagainya, dan Komandan Kapal Perang yang bertugas di UNIFIL); anggota kontingen, yaitu sebagai anggota kontingen baik sebagai pasukan tempur, awak kapal perang, maupun personel yang bertugas dalam satuan tugas zeni dalam HA/DR; Pengamat Militer (*Military Observers*), yaitu para perwira TNI yang bertugas secara individual tetapi masuk dalam organisasi gabungan misi perdamaian yang bertugas untuk memantau perkembangan situasi keamanan di wilayah tertentu yang dimandatkan oleh PBB; dan Tim Monitoring Organisasi Regional, yaitu para personel TNI atau Kemhan yang diberikan tugas untuk memonitor situasi keamanan di wilayah tertentu yang dimandatkan oleh organisasi regional.

### **Kompetensi yang Diharapkan**

Diplomasi pertahanan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah di bidang politik luar negeri, khususnya di bidang pertahanan. Untuk memenuhi harapan tersebut, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Kemhan dan TNI yang mempunyai kompetensi yang memadai. Kompetensi yang dimaksud adalah seperti yang dimaksudkan oleh Spencer & Spencer bahwa:

*“A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation”.*<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Spencer, L. M. Jr & Signe M. Spencer, *Competence at Work: Models for Superior Performance*, (Canada: John Wiley & Sons, 1993), hlm. 9.

Ada beberapa kompetensi yang telah dimiliki oleh seseorang, dan ada beberapa yang bisa diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Organisasi perlu mengembangkan kompetensi bagi para pejabat dan staf yang terlibat dalam diplomasi pertahanan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak, kompetensi-kompetensi yang perlu dikembangkan antara lain *Language Skills*, *Diplomacy and Negotiation Skills*, *Relationship Building*, *Information Seeking*, dan *Analytical Thinking*.

Adapun pengertian dari kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijelaskan secara singkat. *Language Skills* adalah kemampuan menggunakan bahasa resmi internasional, baik kemampuan berbahasa aktif maupun pasif. *Diplomacy and Negotiation Skills* adalah kemampuan untuk dapat menyampaikan dan mengkoordinasikan kepentingan nasional negaranya secara persuasif melalui korespondensi, *bargaining*, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan pandangan, *lobby*, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Kompetensi *Relationship Building* merupakan kemampuan untuk menjalin dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab yang dapat berguna dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Kompetensi *Information Seeking* merupakan kemampuan individu dalam mencari informasi secara mendalam mulai dari mempertanyakan secara langsung terhadap masyarakat, melakukan penelitian yang luas, menemui orang lain untuk mendapatkan informasi, atau dapat dikatakan besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Sedangkan *Analytical Thinking* adalah kemampuan dalam berpikir analitis yang dibutuhkan bagi pelaksana diplomasi pertahanan karena kemampuan ini menjadi instrumen dalam memahami situasi dengan cara memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih rinci (faktor-faktor) atau mengamati keadaan tahap demi tahap berdasarkan pengalaman masa lalu.

## **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada pengambil kebijakan baik di lingkungan Kementerian Pertahanan maupun Tentara Nasional Indonesia. Pertama, diplomasi pertahanan merupakan alat atau *means* yang perlu dipergunakan dengan sebaik-baiknya karena terbukti telah memberikan hasil yang

signifikan bagi Indonesia dalam menciptakan kondisi yang lebih aman, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Pemanfaatan *soft power* sebagai penyeimbang atau *ballast* dari *hard power* menghasilkan pandangan yang lebih baik dari komunitas internasional terhadap Indonesia. Untuk itu diplomasi pertahanan perlu diberikan porsi yang seimbang dalam sistem pertahanan kita.

Untuk menyelenggarakan diplomasi pertahanan yang efektif, diperlukan SDM Kemhan dan TNI yang mempunyai kompetensi yang memadai. Untuk itu diperlukan pola rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan diplomasi pertahanan tersebut. Ada beberapa kompetensi yang memang sudah melekat pada personel tersebut. Namun, ada beberapa kompetensi yang dapat ditingkatkan. Untuk itu sistem pendidikan dan pelatihan bagi personel Kemhan dan TNI perlu mengakomodir kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan diplomasi pertahanan ini. Dengan sistem rekrutmen dan Diklat yang baik, maka upaya-upaya kita dalam diplomasi pertahanan akan memberikan hasil yang lebih baik lagi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djelantik, S. 2008. *Diplomasi: Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hakim, Chappy. 2011. *Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan*. Jakarta: Red & White Publishing.
- Morgenthau, H.J. dan Kenneth W. Thompson. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shoelhi, M. 2011. *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Spencer, L. M. Jr & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. Canada: John Wiley & Sons.
- Biro Hukum Departemen Pertahanan. 2007. *Buku Himpunan Perundang-undangan yang Terkait dengan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pertahanan*. Jakarta: Departemen Pertahanan.
- Direktorat Analisa Strategis Kemhan (Ditanstra). 2011. *Updating Analisa Strategis: Potensi Kerja sama dan Kemungkinan Ancaman Tahun 2011*. Jakarta : Ditanstra.

### Jurnal

- Horta, L. 2008. "In Uncle Sam's Backyard: China's Military Influence in Latin America". *Journal Military Review*. September-October 2008.
- Hasibuan, Rosmi. 2005. "Tinjauan Yuridis Konflik Indonesia Malaysia Tentang Kepemilikan Hak Berdaulat Atas Blok Ambalat dan Ambalat Timur". *Jurnal Equality*. Vol. 10. 2 Agustus 2005.

## Website

- Antara News Kupang. "Perahu Dibakar Patroli AL Australia, Nelayan Kupang Kesulitan", 5 Mei 2008, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/101239/perahu-dibakar-patroli-al-australia-nelayan-kupang-kesulitan>, diunduh pada 28 Agustus 2011.
- Blank, S. 2011. "China: Defense Diplomacy, Chinese Style", dalam <http://www.atimes.com> , diunduh pada 28 Agustus 2011.
- Huxley, T. 2000. *Defending the Lion City: The Armed Forces of Singapore*. New South Wales : Allen & Unwin, dalam <http://www.questia.com>, diunduh pada 28 Agustus 2011.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2010. "Pertemuan Kelompok AM (PKA), Perkembangan di Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Stabilitas Politik dan Keamanan di Kawasan Asia Pasifik: Penguatan Posisi dan Strategi RI", dalam <http://www.kemlu.go.id>, diunduh pada 28 Agustus 2011.
- Kompas.com, "Kronologi Satgas TNI di Perairan Somalia", 2 Mei 2011, dalam <http://internasional.kompas.com> diunduh pada 7 Juli 2011.
- Liputan 6 SCTV.com, "Nelayan Indonesia Tewas Ditembak Polisi Malaysia", 8 Maret 2001, dalam <http://berita.liputan6.com>, diunduh pada 7 Juli 2011.
- Swee-Hock, S. 2005. *ASEAN-China Relations*. Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, dalam <http://www.questia.com>, diunduh pada 22 Agustus 2011.
- The Times of India, "Flurry of War Games to Boost Defence Diplomacy", 22 Oktober 2010, dalam <http://articles.timesofindia.indiatimes.com>, diunduh pada 28 Agustus 2011.
- Viet Nam Today, "Defence Diplomacy, Vital for Nation's Future", 9 Agustus 2011, dalam <http://www.dztimes.net>, diunduh pada 28 Agustus 2011.
- Wikipedia Encyclopedia. 2011. *Defence Diplomacy*, dalam <http://en.wikipedia.org> diunduh pada 28 Agustus 2011.

## Kamus

- Collins Cobuild. 2001. *English Dictionary for Advanced Learners*. London: William Collins Sons & Co. Ltd,
- Collins English Dictionary—Complete & Unabridged 10<sup>th</sup> Edition. 2009. London: William Collins Sons & Co. Ltd.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

